



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## POTENSI INVESTASI ASING PADA KEK INDUSTRI HALAL SIDOARJO

**Eka Budiyantri**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

**Aditya Eka Pranandiansyah**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[aditya.pranandiansyah@dpr.go.id](mailto:aditya.pranandiansyah@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama pembangunan KEK adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing. Saat ini, sudah ada 24 KEK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang memberikan berbagai insentif menarik bagi investor. KEK telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat investasi yang terealisasi di KEK mencapai Rp242,5 triliun secara kumulatif. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total kumulatif hingga September 2024 mencapai 151.260 orang. Dengan adanya 394 pelaku usaha di KEK, pemerintah semakin yakin bahwa target investasi di KEK akan tercapai.

Salah satu KEK yang belakangan ini menarik perhatian investor adalah KEK Industri Halal Sidoarjo dengan total area 796,65 hektare. KEK Industri Halal Sidoarjo baru-baru ini menerima kunjungan istimewa dari 28 delegasi perusahaan makanan dan minuman internasional asal Tiongkok pada 15 November 2024. Kunjungan tersebut diikuti oleh 50 orang dan membahas potensi besar dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia. Dalam acara tersebut, delegasi Tiongkok menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap berbagai insentif yang ditawarkan oleh KEK Industri Halal Sidoarjo, seperti *tax holiday*, kemudahan perizinan halal, dan fasilitas investasi eksklusif yang hanya tersedia di kawasan ini.

Indonesia saat ini memiliki cita-cita untuk menjadi pusat industri halal global. Meskipun konsumsi produk halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 10 persen dari total konsumsi produk halal dunia, kontribusi Indonesia dalam hal produksi masih perlu ditingkatkan. KEK Industri Halal Sidoarjo merupakan langkah nyata untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut. Berada di lokasi strategis dan terhubung dengan berbagai proyek nasional, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), KEK ini menawarkan peluang besar di sektor hilirisasi, logistik, dan perdagangan. Dengan target investasi sebesar Rp97,8 triliun hingga tahun 2045 dan proyeksi penciptaan 317.650 lapangan kerja, kawasan ini diharapkan dapat menjadi ekosistem terintegrasi yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia.

Saat ini, KEK Industri Halal Sidoarjo telah mendapatkan kepercayaan investasi berskala internasional sebesar Rp50 miliar, yang diinvestasikan oleh investor asal Singapura, Super Dry Marine. Direktur Super Dry Marine, Aaron, berharap investasi ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar KEK Industri Halal Sidoarjo. Produk-produk yang diproduksi akan diekspor ke Amerika Serikat dan beberapa negara di benua Eropa lainnya. Investasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen investasi untuk meningkatkan industri ekonomi Indonesia, termasuk meningkatkan dampak ekonomi daerah di sekitar KEK.

Dengan potensi yang sangat besar, KEK Industri Halal Sidoarjo diharapkan dapat menjadi ekosistem yang mendukung seluruh rangkaian proses, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi produk halal secara menyeluruh. Tujuan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2025.

## Atensi DPR

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menarik investasi asing guna mempercepat pengembangan industri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pemberian insentif yang kurang sesuai dengan kondisi wilayah, hingga koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku usaha yang belum optimal. Sehubungan dengan tantangan tersebut, maka Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain: 1) mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan KEK; 2) melakukan evaluasi kinerja dan kesesuaian insentif; 3) meningkatkan koordinasi antarstakeholder pada KEK; dan 4) melakukan penyederhanaan birokrasi demi meningkatkan minat investor luar negeri untuk berinvestasi di KEK.

## Sumber

finance.detik.com, 16 November 2024;  
kek.go.id, 16 November 2024;  
money.kompas.com, 19 November 2024;  
supplychainindonesia.com, 19 November 2024; dan  
tribunnews.com, 24 November 2024.

Minggu ke-3 November  
(18 s.d. 24 November 2024)

# 2024



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024